

PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENSOSIALISASIKAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019 PADA KELOMPOK MARJINAL KOTA BANDUNG

Yulia Sariwati S.¹, Dini Rahmawati²

Fakultas Komunikasi dan Bahasa

Universitas Bina Sarana Informatika, Bandung, Indonesia

Email: yulia.ysy@univbsi.ac.id

Abstrak

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilihan umum guna meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Memberikan hak suara saat pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik aktif dalam keberlangsungan sistem politik demokratis. Sebagai agen sosialisasi, salah satu target sasaran kegiatan sosialisasi KPU Kota Bandung adalah kelompok masyarakat terpinggirkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan studi deskriptif. Hasil menunjukkan antusiasme kelompok marginal untuk hadir mengikuti sosialisasi dan diskusi pada saat kegiatan sosialisasi berlangsung.

Kata Kunci: Sosialisasi, Pemilihan Umum, Kelompok Marjinal.

THE ROLE OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION IN DISSEMINATING SIMULTANEOUS GENERAL ELECTIONS IN 2019 IN THE MARGINAL GROUP OF BANDUNG CITY

Abstract

General Election Commission have an important role in electoral socialization to increase public participation and awareness of using voting rights. Giving voting rights during elections is a form of active political participation in a democratic political system. The socialization target of the electoral commission Bandung city as a social agent is a marginal group of peoples. The method used in this research is a qualitative research method, with descriptive study approach. The result showed enthusiasm from the marginal group of peoples to attend of socialization and discussion events.

Key Words: Socialization, Election, Marginal Group

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) adalah perwujudan nyata keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih saat pemilu menunjukkan sejauh mana tingkat kesadaran masyarakat

sebagai warga negara dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara itu sendiri.

Pemilihan umum merupakan salah satu indikator penyelenggaraan demokrasi, dimana rakyat secara langsung dilibatkan dalam menentukan pemimpin dan arah dan kebijakan

politik negara untuk lima tahun ke depan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Penyelenggaraan pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pilpres dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia. Pelaksanaan pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Kegiatan partisipasi politik utamanya tertuju pada dua hal utama, yaitu pemilihan pemimpin dan menilai pelaksanaan kebijakan pemimpin. Bentuk partisipasi politik masyarakat beragam jenisnya, namun memberikan hak suara merupakan salah satu bentuk partisipasi politik aktif yang paling populis dalam keberlangsungan sistem politik demokratis. Tingkat partisipasi pemilih dalam memberikan hak suara sering dijadikan variabel untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

Jelang penyelenggaraan pemilu serentak 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung berupaya meningkatkan jumlah partisipasi aktif seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Oleh sebab itu, guna meningkatkan kesadaran politik masyarakat untuk memberikan hak suara dalam penyelenggaraan pemilu, maka KPU Kota Bandung melakukan kegiatan

sosialisasi pada kelompok-kelompok marjinal.

Adapun yang dikategorikan kedalam kelompok marjinal (kelompok masyarakat terpinggirkan) mayoritas merupakan kaum urban yang meliputi: pedagang kaki lima (PKL), para pekerja seks komersial (PSK), gelandangan dan pengemis (gepeng), kaum waria, pemulung, dan lain sebagainya.

TINJAUAN TEORITIS

Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu prasyarat utama dalam keberlangsungan system politik yang demokratis. Tingkat pengetahuan politik ditengah masyarakat di negara-negara berkembang tidak lah sama dengan Negara-negara maju. Oleh sebab itu, para agen-agen sosial, seperti KPU, Parpol memiliki peranan kunci dalam mengenalkannya kepada masyarakat melalui sosialisasi.

Sosialisasi dan Sosialisasi Politik

Sosialisasi adalah proses pembinaan kepribadian agar seseorang dapat hidup *conform* dengan tuntutan kelompok dan kebudayaannya. Proses sosialisasi dalam artian luas diidentikan dengan pendidikan, biasanya menyangkut pada kepentingan individu, kelompok masyarakat dan kebudayaan tertentu. (Hanum, 2011:57-58)

Sedangkan sosialisasi politik didefinisikan sebagai suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik kepada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala politik. (Raga Maran, 2001:136) Melalui sosialisasi politik, individu diharapkan mau dan mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan politik.

Partisipasi Politik

Menurut Mirriam Budiardjo partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*), kegiatan ini mencakup seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok

kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya. (Budiardjo, 1982:1)

Samuel P Huntington dan Joan M.Nelson menyatakan bahwa partisipasi politik adalah aktivitas pribadi warga negara untuk mempengaruhi pembuatan keputusan

pemerintah. (Huntington & Nelson, 1990:94)

Sedangkan pendapat Closky partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela (*voluntary*) dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung (*direct*) atau tidak langsung (*indirect*) dalam proses pembentukan kebijaksanaan umum. (Harun & Sumarno, 2006:130)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan studi analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui proses observasi dan wawancara dengan melibatkan partisipasi aktif penulis didalam kegiatan sosialisasi bersama lembaga KPU Kota Bandung dan kelompok sasaran.

Data penunjang lainnya, diperoleh melalui studi literature dari buku-buku dan sumber-sumber lainnya seperti website.

PEMBAHASAN

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pemilu di Indonesia. Tugas dan kewenangan KPU merujuk pada Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999,

meliputi: (1) Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu, (2) Menerima, meneliti dan menetapkan partai politik peserta pemilu, (3) Membentuk panitia pemilihan, mengkoordinasikan kegiatan pemilu dan tempat pemungutan suara, (4) Menetapkan jumlah kursi anggota dewan, (5) Menetapkan hasil pemilu secara keseluruhan, (6) Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data-data hasil pemilu, dan (7) Memimpin tahapan kegiatan pemilu.

Jika dilihat dari tugas dan kewenangannya, kegiatan sosialisasi penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh KPU dalam upaya menumbuhkan kesadaran warga negara dan guna meningkatkan jumlah partisipasi aktif pemilih masuk kedalam tugas dan kewenangan poin pertama.

Kajian yang dilakukan KPU menemukan bahwa ada beberapa faktor penyebab kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan, sehingga memilih menjadi golongan putih (golput), yaitu :

1. Penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan elit partai politik, terutama masalah perilaku korup sejumlah elit politik.

2. Sikap kritis masyarakat yang lebih sadar dan dapat menganalisis berkaitan dengan realisasi janji-janji saat kampanye pada pemilu sebelumnya. Terutama berkaitan dengan tingkat realisasi dari janji kampanye yang relatif rendah, serta tidak dapat memperjuangkan aspirasi rakyat.
3. Prosedural system pemberian hak suara, dimana banyak kaum urban tidak dapat memberikan suaranya pada TPS tempat tinggalnya karena terdaftar di TPS daerah.
4. Kegagalan partai politik dalam melakukan komunikasi dan sosialisasi politik guna menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat
5. Kurangnya sosialisasi oleh Lembaga Pemilihan Umum sehingga orang-orang tidak mengetahui seberapa besar manfaat keterlibatan aktif masyarakat pada pemilu itu sendiri.

Faktor yang kelima menunjukkan peran KPU dalam sosialisasi, ikut menentukan tingkat partisipasi pemilih. Dalam program sosialisasinya, KPU dituntut kreatif dan inovatif guna menarik keingintahuan peserta sosialisasi, misalnya pemilihan metode dan media dalam pelaksanaan sosialisasi.

Metode sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Bandung menggunakan metode tatap muka. Metode ini dipilih berdasarkan pertimbangan agar dapat menyampaikan materi sosialisasi secara langsung kepada kelompok sasaran. Selain lebih jelas dalam menyampaikan informasi, juga bisa memberikan pemahaman lebih jauh dengan membuka kesempatan bagi kelompok sasaran untuk bertanya ataupun diskusi mengenai penyelenggaraan pemilu dan tujuannya. Alasan lain pemilihan metode tatap muka, agar kelompok sasaran dapat mempercayai bahwa KPU sebagai penyelenggara legal kegiatan pemilu 2019.

Kelompok sasaran sosialisasi KPU yang masuk kategori basis marginal di Kota Bandung dominan tersebar berada di tiga kecamatan, meliputi Kiaracondong, Andir dan Ujung Berung. Kegiatan sosialisasi pemilu 2019 dilaksanakan pada tanggal 11 April 2019 mengambil tempat di Aula Kantor Kecamatan Kiaracondong, Jalan Babakan Sari, Kiaracondong – Bandung. Kegiatan sosialisasi dihadiri lebih dari 40 orang peserta, didominasi

oleh kaum waria yang tergabung dalam kelompok “Srikandi”.

Antusiasme kelompok marginal perkotaan saat menghadiri sosialisasi pemilu, menunjukkan jika selama ini sikap apatis mereka terhadap kegiatan penyelenggaraan pesta demokratis lebih dikarenakan minimnya pengetahuan mereka tentang politik, peran mereka sebagai masyarakat biasa dalam penyelenggaraan negara dan mekanisme pelaksanaan pemilu serentak.

PENUTUP

Idealnya, sosialisasi politik dilakukan tidak secara incidental, tujuannya memberikan ruang pemahaman bagi keluarga agar terbuka terhadap kondisi politik yang ada. Bagi masyarakat agar terlibat aktif dalam proses pemilu guna menentukan pemimpin dan arah penyelenggaraan negara lima tahun kedepan.

Bagi penyelenggara pemilu sedianya bisa menyusun strategi dalam upaya mensosialisasikan pemilu pada seluruh masyarakat sebagai pemilih secara optimal, tujuannya guna meningkatkan kesadaran serta kecakapan pemilih sebagai partisipatoris didalam menggunakan haknya sebagai warga negara.

Bagi partai politik yang memiliki fungsi sebagai media komunikasi

politik dapat menjalankan peran dan fungsi sebagaimana mestinya. Selama ini para partai politik dan elit partai, belum bisa menjalankan fungsinya secara seimbang antara mengejar kepentingan politik dan menyampaikan pendidikan politik kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam. 2001. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia: Jakarta.

Hanum, Farida. 2011. *Sosiologi Pendidikan*. Yogyakarta: Kanwa Publisher.

Harun, Rochajat. Sumamo. 2006. *Komunikasi Politik sebagai Suatu Pengantar*. Bandung: Mandar Maju.

Huntington, Samuel P. dan Joan Nelson 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.

Raga Maran, R. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

